



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Diskusi DEN & Komisi VII DPR - Distribusi BBM Subsidi Baiknya Pola Tertutup
Tanggal	: Rabu, 27 April 2022
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

Diskusi DEN & Komisi VII DPR Distribusi BBM Subsidi Baiknya Pola Tertutup

PENDISTRIBUSIAN Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi disarankan dengan pola tertutup, agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Soalnya, ekonomi pasar tidak bisa diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sehingga perlu strategi subsidi yang tepat sasaran.

"Apabila pola distribusi energi masih terbuka seperti ini, akan terjadi permasalahan yang berulang ke depannya. Perlu ide atau solusi untuk dilakukan distribusi secara tertutup," kata mantan anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha saat menjadi narasumber dalam diskusi *Indonesia Business Forum* dengan tema Subsidi BBM Membengkak, Penyimpangan Merajalela, Rakyat Menderita di Jakarta, kemarin.

Hadir pula dalam acara tersebut Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dan pengamat energi Kurtubi.

Satya yang juga anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ini menjelaskan, data per Maret 2022, telah terjadi kelebihan kuota BBM subsidi di 25 dari 34 provinsi. Over kuota ini akan membebani keuangan negara, sehingga perlu langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini.

Satya bilang, dengan disparitas tinggi antara harga solar subsidi dan nonsubsidi yang mencapai



Satya Widya Yudha

Rp 8.550 per liter, tidak menutup kemungkinan banyak terjadi penyalahgunaan. Hal itu juga karena pasokan terbatas, sedangkan permintaan tinggi.

Menurutnya, penggunaan BBM subsidi sebenarnya sudah diatur. Yakni, kendaraan bermotor perseorangan roda empat maksimal 60 liter per hari. Sedangkan kendaraan angkutan orang atau barang roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari.

Kelangkaan BBM bersubsidi, lanjutnya, menjadi tugas bersama.

"Saya tidak yakin BPH Migas bisa sendirian melakukan pemeriksaan ke seluruh SPBU di Indonesia dengan SDM terbatas. Perlu sistem terpadu dan melibatkan Pemerintah Daerah serta aparat hukum," ujar Satya. ■ KAL